

Harus Diwaspadai Serangan Siber

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi A DPRD Jateng Sururul Fuad minta kepada Pemprov Jateng untuk waspada serangan siber yang bisa mengancam kapan saja. Menurutnya situs-situs milik Pemprov Jateng mempunyai potensi untuk diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sururul Fuad mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Rabu (21/9). Langkah pengamanan situs-situs milik Pemprov Jateng harus dilakukan secara maksimal.

"Jangan sampai ada situs yang diretas baru dilakukan peningkatan keamanannya. Data-data yang dimiliki pemerintah harus dijaga keamanannya. Jangan sampai bocor kemudian diperjual belikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab," kata Sururul Fuad. Berkaca dari kasus Bjorka yang mampu meretas situs milik pemerintah pusat, sehingga banyak data masyarakat yang bocor, anggota Fraksi PKS DPRD Jateng ini menilai Pemprov Jateng harus meningkatkan sistem keamanan dari serangan para hacker.

Kemampuan digitas SDM yang mengelola situs milik pemerintah harus terus diupgrade untuk membentengi dari serangan hacker. "Teknologi digital terus berkembang dengan sangat cepat. Untuk itu kemampuan SDM pengelolanya harus terus diupgrade. Demikian juga dengan sistem perlindungan terhadap situs-situs pemerintah juga harus terus diupgrade. Teknologi semakin canggih sistem perlindungan kita juga harus lebih canggih," tegas Sururul Fuad.

Sururul Fuad juga menilai saat ini kesadaran publik untuk melindungi data pribadinya masih rendah. Kesadaran untuk melindungi data pribadi harus dibangun untuk meningkatkan kewaspadaan publik dan perlindungan terhadap data yang mereka miliki. Masyarakat harus sadar di era digitalisasi ini bahwa data pribadi itu bisa menjadi komoditas yang diperjual belikan oleh kapitalis. Mereka menganggap data merupakan obyek perdagangan yang menguntungkan. (Bdi)

Regsosek, BPS Temanggung Libatkan Ribuan Petugas

TEMANGGUNG (KR) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung mengerahkan 1.372 petugas untuk pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek). Kepala BPS Kabupaten Temanggung Haryono mengatakan kebutuhan petugas tersebut antara lain untuk koordinator seluruh petugas sebanyak 39 orang, pemeriksa lapangan (PML) sebanyak 272 orang, pencatat lapangan (PPL) sebanyak 1.061 orang sehingga keseluruhan 1.372 orang. Dikatakan regsosek adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. "Regsosek sebagai integrasi program dan menuju satu data Indonesia," kata Haryono pada rapat koordinasi pendataan awal Regsosek bertema 'Mencatat untuk membangun negeri satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat'.

Haryono mengatakan pelaksanaan pendataan awal regsosek untuk pengumpulan data 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 sedang pengolahan data pada 2023. Cara pengumpulan data secara door to door menggunakan paper and pencil interview dan dilengkapi dengan geotag dan foto. Informasi yang dikumpulkan yakni kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan kemiskinan ekstrim disebabkan oleh masalah multi-dimensi. Penanganan masalah kemiskinan ekstrim membutuhkan upaya kerja sama multi-dimensi, lintas pemerintahan dan melibatkan aktor non-pemerintah. "Ada dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim adalah konvergensi dan perbaikan akurasi pensasaran program," katanya. (Osy)

Perdes Diajak Bangun Desa Berkeadilan

MAGELANG (KR) - Anggota DPR RI Ir Sudjadi dari PDI Perjuangan, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Sosialisasi diikuti Kepala desa (Kades), perangkat desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat tersebut, mengungkap tema silaturahmi dan komunikasi untuk membangun desa yang berkeadilan.

"Empat pilar kebangsaan ini harus dimaknai sebagai alat untuk membangun bangsa, dengan cara menyerap aspirasi warga guna disampaikan kepada pemerintah melalui perwakilan di DPR," kata Ir Sudjadi selaku anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil 6 Jateng (Kabupaten Magelang, Temanggung dan Purworejo), di Grand Artos Hotel Magelang, Senin (19/9).

Pada sosialisasi tersebut, beberapa Kades mengajukan program pembangunan desa, seperti Sulastris SE Kepala Desa (Kades) Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, ia mengajukan pembangunan pasar ikan di desanya, karena saat ini sudah ada kelompok perikanan Jati Makmur yang beranggotakan 50 orang. Dengan pasar ikan tingkat desa ini, nantinya diharapkan dapat menjadi aktivitas warga dalam memasarkan hasil perikanan ikan air tawar.

"Selama ini, aktivitas warga terutama anggota kelompok perikanan ikan air tawar sudah bertumbuh, baik budi daya ikan konsumsi maupun pembibitan ikan, dan selama ini anggota kelompok memasarkan ikannya ke luar daerah, sehingga kurang efektif. Alangkah baiknya jika Desa Sirahan mempunyai pasar ikan sendiri, sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga," ujar Sulastris. (Bag)



KR-Bagyo Harsono

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Pemerintah Tidak Lagi Berikan Subsidi Pupuk

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah tidak lagi memberikan subsidi untuk pupuk Za termasuk pada komoditas tanaman tembakau. Petani harus membeli pupuk Za non subsidi yang harganya lebih mahal jika ingin memupuk tanaman tembakau. SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan pencabutan subsidi berbagai jenis pupuk termasuk Za sejak 8 Juli 2022. Kini pemerintah hanya memberikan subsidi untuk dua jenis, yakni Urea dan NPK.

"Subsidi pupuk juga telah dikurangi, kini hanya untuk tanaman padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan putih, kakao, tebu. dan kopi," kata Agus Susanto, di sela Media Gathering, Selasa (20/9). Dikatakan pada awal hingga pertengahan 2022 pemerintah masih

mensubsidi pupuk Za untuk tanaman tembakau. Hingga kemudian keluar kebijakan penarikan subsidi sejumlah komoditas dan pupuk. "Komoditas yang mendapat subsidi yang menimbulkan inflasi," katanya.

Agus Susanto mengatakan sebenarnya tidak ada kelangkaan pupuk di Indonesia termasuk di Temanggung. Sebab produksi pupuk telah diperhitungkan dan disesuaikan kebutuhan untuk pertanian. Jika ada informasi kelangkaan pupuk kemungkinan petani tidak terdaftar pada kelompok tani atau menuliskan kebutuhan pupuk tanaman padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan putih, kakao, tebu. dan kopi," katanya.

Karenanya, Agus Susanto mengatakan pada petani untuk masuk di kelompok tani

dan mencatatkan kebutuhan pupuk dalam RDKK serta tidak memanfaatkan pupuk sesuai aturan. Dikemukakan untuk subsidi pupuk dari pemerintah disesuaikan anggaran, sebagai contoh dari usulan 25 juta ton yang bisa disubsidi hanya 9,1 juta ton. Sehingga kebutuhan pupuk yang tidak tercukupi pupuk bersubsidi dipenuhi dengan pupuk non-subsidi. "Mengingat harga lebih mahal dan harus mengeluarkan dana tambahan," katanya.

Agus Susanto mengemukakan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Temanggung untuk jenis Urea sebanyak 23.703 ton setahun dan NPK sekitar 16.700 ton. Sesuai dengan ketentuan dari Permendag nomor 15 tahun 2013, pihaknya harus menyiapkan stok pupuk di gudang minimal untuk dua minggu ke depan. Di Te-

manggung dalam dua minggu harus menyiapkan pupuk NPK sebanyak 1.600 ton dan urea sebanyak 1.100 ton.

"Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi jenis NPK Rp 2.300/kg, sedangkan untuk Urea Rp 2.250/kg," kata Agus Susanto sembari mengatakan untuk harga non-subsidi, NPK berkisar Rp

13.000/kg dan pupuk Urea Rp 10.000/kg. Sedangkan serapan pupuk subsidi di Kabupaten Temanggung hingga bulan September 2022, untuk pupuk Urea dari alokasi 23.703 ton sudah terserap sekitar 11.800 ton dan pupuk NPK dari 16.700 ton, sudah terserap 8.500 ton. (Osy)



KR-Zaini Arsoyid

Pekerja mengangkat pupuk di gudang PT Indonesia di Joho Temanggung.

Pelaku Pemotongan BLT Harus Ditindak Secara Tegas

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta kepada seluruh aparat pemerintahan sampai tingkat desa untuk tidak memotong bantuan langsung tunai (BLT) dengan alasan apa pun. Ia minta agar polisi menindak tegas jika menemukan kasus pemotongan dana BLT.

Hal tersebut ditegaskan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Rabu (21/9), terkait adanya dugaan penyuntikan dana BLT bahan bakar minyak (BBM) di Dukuh Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Kasus tersebut diduga dilakukan oleh istri perangkat desa dengan memotong bantuan sebesar

Rp 20.000/KPM.

"Saya tegaskan jangan potong BLT untuk alasan apa pun. Saya bilang tindak tegas kalau melakukan itu. Jangan main-main yang terkait dengan urusan rakyat. Saya sudah menerima laporan adanya dugaan pemotongan BLT ini. Saya sudah kontak dengan Bupati Blora. Hari ini sudah diperiksa polisi, alasannya tidak tahu.

Hari ini seluruh kades akan dikumpulkan, dan Bupati Blora minta agar saya ikut bicara," tegas Ganjar Pranowo.

Kejadian itu sempat viral setelah ada warga yang mengunggah video di media sosial. Video itu berisi seorang wanita yang diduga istri perangkat desa mengumpulkan uang dari warga dengan alasan untuk fotokopi dan beli es.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, istri perangkat desa tersebut memotong dana BLT BBM setelah penerima bantuan menerima uang. Alasan pemotongan tersebut digunakan untuk iuran.

Ganjar Pranowo mengatakan akan turun langsung ke Blora un-

tuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa. Ia berharap dari kasus itu semua perangkat dapat menjaga integritasnya.

Gubernur berharap semua aparat terkait paham terkait bantuan BLT yang tidak boleh dipotong.

Informasi terakhir setelah kasus pemotongan dana BLT beredar luas di masyarakat, oknum pelaku pemotongan sudah mengembalikan uang hasil pemotongan kepada yang berhak.

Pengembalian uang pemotongan BLT dilakukan setelah pihak kepolisian turun untuk melakukan penyelidikan. (Bdi)

Program DASHAT Untuk Cegah Stunting

BANJARNEGARA (KR) - Salah satu tantangan pembangunan keluar-ga di Kabupaten Banjarnegara adalah masih tingginya angka stunting. Stunting merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani secara konvergen oleh semua pihak. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) angka stunting Kabupaten Banjarnegara pada bulan Juli 2022 adalah 21,07 persen. "Jumlah ini masih sangat tinggi dibandingkan target nasional yaitu 14 persen pada 2024," kata Penjabat Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto.

Berbicara pada acara peluncuran program Da-

pur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di aula kantor Desa Pingit kecamatan Rakit, Selasa (20/9), Tri Harso mengatakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara, dilakukan intervensi spesifik berupa pemenuhan gizi yang seimbang untuk para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Menurutnya, program DASHAT merupakan salah satu program yang memanfaatkan sumberdaya lokal termasuk bahan pangan lokal. "Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah stunting," ujar Tri Harso.

Ketua Tim Pengerak

PKK Banjarnegara, Lucia Tri Harso menambahkan, selain terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, ibu hamil atau ibu menyusui dan keluarga risiko stunting, melalui program DASHAT, masyarakat desa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan penyediaan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal. Selain itu juga meningkatnya kesejahteraan keluarga, melalui keterlibatannya dalam kelompok usaha keluarga masyarakat yang berkelanjutan.

"Salah satu fokus pembangunan adalah pencegahan stunting agar anak tumbuh optimal dan maksimal sehingga kelak menjadi SDM yang handal,"

ujarnya. Lucia Tri Harso menambahkan, para orang tua hendaknya sadari bahwa anak tidak cukup hanya makan kenyang, namun harus memperhatikan gizi.

Kepala Dispermadep PPKB Banjarnegara, Hendro Cahyono, mengatakan, Pemerintah mentargetkan penurunan stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Untuk mencapainya dilakukan berbagai ikhtiar melalui percepatan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan ragam kegiatannya antara lain edukasi dan pendampingan bumil, calon pengantin, balita, rembug stunting dan lainnya.

DASHAT merupakan inovasi dari Desa Pingit dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting, berupa pemberian makanan dari bahan lokal dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui dapur sehat.

Pada kesempatan itu Penjabat Bupati beserta Tim Penggerak PKK memberikan bahan makanan bergizi berupa beras, bubur, dan susu kepada para balita di desa setempat.

Acara tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKK-BN Sri Winarti SPd, Kepala Kemenag, Kepala BULOG Cabang Banyumas Kepala Puskesmas Rakit 1 dan 2 dan Kepala Desa se Kecamatan Rakit. (Mad)



KR-Istimewa

Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, menyerahkan secara simbolis makanan bergizi kepada salah satu balita.

Tak Ada Penghapusan Golongan Pelanggan

SEMARANG (KR) - PT PLN (Persero) tegaskan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA. Daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA dan tidak ada perubahan tarif listrik. "Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. Selama ini, Pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan dari Pemerintah tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (19/9).

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin (12/9), tidak ada pembahasan formal apapun atau agenda tentang pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Darmawan menegaskan, PLN terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan listrik. PLN memastikan pelayanan kelistrikan di Tanah Air tetap andal dan optimal, sehingga menjaga produktivitas dan daya beli masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya harga komoditas energi dunia. (Cha)

Mimbar Legislatif

UMKM Harus Memperbanyak Produk Andalan

KETUA DPRD Jateng Bambang Kusriyanto minta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk memperbanyak produk andalan guna meningkatkan roda perekonomian.

Hal ini harus dilakukan mengingat banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Semarang yang perlu dimaksimalkan dengan baik.

Bambang Kusriyanto mengatakan hal ini saat sosialisasi non Perda dengan tema 'Identifikasi Produk Unggulan Oleh-Oleh Khas Kabupaten Semarang' di Kantor Kecamatan Sumowono, Jumat (16/9). Dengan memperbanyak produk unggulan, diharapkan akan menambah keuntungan UMKM.

Kabupaten Semarang memiliki banyak ragam jenis makanan yang menjadi ciri khas Kabupaten Semarang. UMKM di harapkan mampu mengeksplor potensi tersebut sekaligus untuk mengenalkan produk-produk unggulan daerah ini melalui ragam kulineran.

Salah satu jenis makanan khas Kabupaten Semarang adalah tahu bakso. Jenis makanan satu ini menjadi andalan UMKM, karena baik masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang atau para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Se-



KR-Budiono

Bambang Kusriyanto

marang dan sekitarnya, selalu berupaya bisa membeli tahu bakso untuk oleh-oleh.

Ketua KNPI Kabupaten Semarang Bagus Suryokusumo sepakat dengan apa yang disampaikan Bambang Kusriyanto.

Di Kabupaten Semarang banyak jenis makanan khas yang bisa didapat wisatawan untuk oleh-oleh. Untuk itu pelaku UMKM diharap mampu melihat peluang ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain tahu bakso, makanan tradisional kas Kabupaten Semarang lainnya yang sudah melegenda adalah tahu serasi Bandungan, torakur atau tomat rasa kuma, penganan egg roll, serabi Ngampin, sirup kopi Eva dan jenis makanan lainnya.

Jenis makanan tersebut yang selalu diburu oleh para wisatawan. DPRD Jateng berharap produk UMKM harus semakin meningkat dari hari ke hari.

UMKM harus lebih rajin untuk memproduksi makanan khas Kabupaten Semarang khususnya yang menjadi unggulan. (*)

(Disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto Kepada Wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)